KR-Istimewa

Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (LP3M UMY) bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bantul memberikan pelatihan digital marketing dan pengelolaan website kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) 'Salakan Bersemi' Potorono Banguntapan Bantul, baru-baru ini. Program ini mendukung Salakan sebagai Kampung Ramah Lingkungan. Ketua Pelaksana Dr Dyah Mutiarin mengatakan, pelatihan ini tak hanya penyampaian materi, tapi juga turut melakukan praktik pembuatan konten digital untuk medsos.

PEMERINTAH ANGGARKAN RP 198,7 M

Untuk Pendidikan Kecakapan Kerja/Wirausaha

JAKARTA (KR) - Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 198,7 miliar untuk program peningkatan keterampilan generasi muda yaitu Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW).

Program PKK dan PKW adalah, program prioritas Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang diciptakan untuk mendukung visi pembangunan manusia.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Wikan Sakarinto dalam peluncuran program PKK dan PKW yang digelar secara virtual, di Jakarta, Sabtu (6/3).

Tidak hanya sekolah formal, kata Wikan, pendidikan vokasi pada sekolah nonformal yang menjadi fokus pada program ini pun harus bersinergi dengan industri dan dunia kerja, termasuk di dalamnya peningkatan kerja sama dengan UMKM maupun industri besar.

Menurut Wikan, pandemi Covid-19 menjadi tantangan baru bagi kondisi tenaga kerja Indonesia. Pada April 2020, disebutkan, sebanyak 29,12 juta (14,28 persen) penduduk usia kerja terdampak Covid-19. Jumlah tersebut terdiri pengangguran karena Covid-19 2,56 juta orang, Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 sebanyak 0,76 juta orang, tidak bekerja karena Covid-19 1,77 juta orang dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 sebanyak 24,03 juta orang.

Menguto data yang ada Wikan menyebutkan, pada Agustus 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat 1,84 persen dibandingkan dengan bulan Agustus 2019, sehingga menjadi 7,07 persen. Kondisi tersebut secara tidak langsung menyebabkan melemahnya perekonomian masyarakat.

Di sisi lain, jumlah penduduk miskin di Indonesia seperti tercatat di Badan Pusat Statistik 26,42 juta orang, yaitu meningkat 1,63 juta orang dibandingkan jumlah penduduk miskin di bulan yang sama pada tahun 2019.

"Kondisi ekonomi/kemiskinan menjadi salah satu faktor yang sering mendasari anak tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka putus sekolah karena kurangnya biaya, sedangkan untuk menempuh pendidikan lebih tinggi memerlukan biaya yang tidak sedikit, terlebih pada pendidikan formal," ujarnya.

Menurut Wikan, PKK ditujukan bagi warga Indonesia berusia 17-25 tahun, sedangkan PKW untuk yang berusia 15-25 tahun. Program ini diharapkan membantu lulusan SMK agar bisa meningkatkan kompetensinya dan siap masuk dunia kerja.

Direktur Kursus dan Pelatihan Ditjen Diksi, Wartanto, mengatakan alokasi dana PKK dan PKW tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 yaitu dari Rp 222,7 miliar menjadi Rp 198,7 miliar. Dana bantuan tersebut bukan diberikan kepada peserta PKK dan PKW, melainkan bagi lembaga kursus atau pelatihan yang memenuhi syarat, salah satunya memiliki akta notaris. **(Ati)**

Sekolah Lakukan Persiapan ASPD

YOGYA (KR) - Rencana DIY untuk mengadakan Assesmen Standar Pendidikan Daerah (ASPD) jenjang SD dan SMP disambut positif pihak sekolah. Saat ini sejumlah sekolah mulai melakukan persiapan, termasuk mengintensifkan pembelajaran dan kegiatan *tryout*. Semua kegiatan tersebut dilakukan secara daring.

"Sesuai anjuran Dinas Pendidikan Kota Yogya dan persyarikatan Muhammadiyah, karena masih dalam kondisi pandemi, semua persiapan ASPD dilakukan secara daring. Kami juga sepakat membentuk tim khusus yang mempunyai program dan target khusus. Evaluasi dilakukan setiap pekan. Kami selalu menegaskan pada siswa dan orangtua dalam kondisi apapun harus menjunjung tinggi kejujuran," kata Kepala SD Muhammadiyah Jogokariyan (Mujonta), Fika Widiana, Minggu (7/3).

Fika mengungkapkan, setiap sekolah pasti memiliki target kelulusan, begitu pula dengan SD Mujonta. Tentunya dalam meraih target tersebut harus mengedepankan kejujuran. Karena sebagus apapun nilai yang diraih jika tidak dilandasi kejujuran tak akan banyak berarti. Untuk itu pihaknya berharap agar pemerintah tetap mendorong dan mengukur mutu pembelajaran dan hasil belajar siswa secara objektif dan terukur.

"Nilai raport tidak bisa dijadikan acuan karena pendidik satu dengan yang lain tidak punya pedoman khusus pemberian nilai. Misalnya dalam satu sekolah antara guru satu dengan lainnya dalam memberikan nilai berbeda apalagi sekolah lain," terang Fika, seraya menambahkan, dirinya berharap ASPD tatap muka tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Kepala SMP Gotong Royong, Amelita BR Tarigan menyatakan, secara prinsip pihaknya menyambut baik pelaksanan ASPD di DIY. Walaupun untuk persiapan ASPD sekolah dituntut bekerja secara lebih keras, karena dilaksanakan secara daring. Apalagi kondisi siswa di sekolahnya cukup beragam, sehingga guru dituntut lebih kreatif agar siswa bersemangat dalam belajar.

"Kalau untuk kendala umum belum ada karena saat ini pembelajaran masih dilakukan secara daring. Tapi untuk mempersiapkan siswa dalam ASPD guru perlu sedikit kerja keras," terang Amelita. **(Ria)**

NAKHODAI UNIVERSITAS PERTAMINA

Prof Wirat Siap Wujudkan PT Kelas Dunia

JAKARTA (KR) - Universitas Pertamina (UP) sebagai kampus energi dan bisnis besutan Pertamina melalui Pertamina Foundation terus berbenah mencapai visi universitas kelas dunia. Di bawah kepemimpinan Prof Akhmaloka PhD sejak 2016 hingga 2021, UP menghadirkan lebih dari 175 dosen bergelar master dan doktor lulusan perguruan tinggi terbaik dalam dan luar negeri.

Menginjak usia ke enam, UP berlayar dengan nahkoda baru. Melalui proses pemilihan transparan dan demokratis, Prof I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja PhD dilantik secara resmi sebagai Rektor UP periode 2021-2026. Melalui ikatan kerja sama yang erat antara Pertamina dan ITB, Prof Wirat akan melanjutkan tampuk kepemimpinan Prof Akhmaloka. Prof Wirat berlatar belakang pendidikan di ITB dan University of Kentucky Amerika Serikat (AS) serta pengalaman sebagai birokrat senior di Kementerian ESDM. Prof Wirat juga menjabat sebagai Guru Besar Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB.

KR-Istimewa

Prof IGN Wiratmaja Puja

"Sebagai bagian dari ekosistem Pertamina grup, UP dituntut melahirkan SDM unggul dan menghasilkan penelitian bermanfaat untuk menjawab tantangan energi baru terbarukan. Kolaborasi dan sinergi menjadi kunci untuk menang dalam kompetisi ke depan," ujar Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati dalam acara pelantikan daring yang diikuti Dewan Pembina dan Dewan Penyelenggara UP, baru-baru ini.

Nicke menyampaikan UP menghadapi tantangan besar untuk mewujudkan visi menjadi *world class university* di bidang energi. UP harus sigap dan lincah beradaptasi terhadap kondisi *volatility, uncertainty, complexity* dan *ambiguity* (VUCA) termasuk pandemi Covid-19 yang melanda dunia. **(Ira)**

EKONOMI

Layanan Wakaf Uang Bank Danamon

JAKARTA (KR) - PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) melalui Unit Usaha Syariah (UUS) meluncurkan layanan wakaf uang. Layanan wakaf uang menyasar para nasabah Bank Danamon di seluruh Indonesia termasuk kalangan milenial, karena wakafnya mulai dari wakaf Rp 10.000. Layanan ini tersedia lewat aplikasi digital dan kantor cabang Bank Danamon sehingga memudahkan nasabah untuk menyalurkan wakafkan kapan saja dan kapanpun.

"Nasabah yang ingin berwakaf kini menjadi lebih mudah melalui aplikasi digital dan kantor cabang Bank Danamon. Siapa pun boleh ikut berwakaf termasuk generasi muda milenial dengan nilai wakaf mulai dari Rp 10.000," kata Direktur Danamon Syariah Herry Hykmanto pada acara peluncuran wakaf uang Bank Danamon Syariah secara virtual di Jakarta, Jumat (5/3).

Dikatakan, dengan memanfaatkan kemajuan infrastruktur digital Bank Danamon bermitra dengan PT Minasa Finteknologi Syariah, berwakaf kini bisa dari telepon genggam kapan saja dan dimana saja. Nasabah tidak perlu datang ke Lembaga Pengelola Wakaf atau yang disebut Nazhir, serta dana dikelola secara transparan dan profesional.

"Danamon Syariah menawarkan beragam program yang bermanfaat secara berkelanjutan seperti wakaf untuk pemberdayaan peternak hewan Qurban, wakaf untuk pembangunan Rumah Sakit, wakaf untuk Pendidikan, dll. Ke depannya, kami akan memperbanyak program wakaf produktif untuk semakin meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat," pungkas Herry. **(Lmg)**

BI DIY Bidik 300 Ribu Merchant QRIS Sepanjang 2021

YOGYA (KR) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi melibatkan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP)baik Bank maupun Non-Bank, komunitas pelaku usaha, pelaku usaha maupun masyarakat DIY guna mensukseskan penggunaan program Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Program tersebut dalam rangka upaya mendorong membentuk ekosistem digital di DIY sebagai bagian dari ekosistem digital Indonesia. "Kita terus berupaya mendorong terbentuknya ekosistem digital di DIY, salah satunya menggencarkan dan menggiatkan penggunaan QRIS. Upayanya dengan memperluas cakupan akselerasi transaksi digital QRIS di beberapa titik potensial di DIY berkolaborasi dengan berbagai pihak," tutur Kepala Perwakilan BI DIY Hilman Tisnawan di Yogyakarta, Minggu (7/3).

Hilman menyampaikan, strategi perluasan akselerasi transaksi digital QRIS ini bertujuan supaya masyarakat DIY baik pengguna maupun merchant benar-benar tersosialisasi dan teredukasi manfaatnya. Sebab transaksi digital dengan QRIS untuk pengguna maupun merchant lebih baik, mudah dan aman. Transaksi secara contactless tentu dapat memperkecil resiko penyebaran virus ketimbang transaksi menggunakan uang tunai di masa pandemi Covid-19 ini.

"Dengan bertransaksi menggunakan QRIS maka masyarakat turut membantu pencegahan peredaran uang palsu, mendorong efisiensi bertransaksi, meningkatkan keuangan inklusif dan memajukan pelaku usaha yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi DIY," tegasnya.

BI berharap penggunaan QRIS semakin meningkat pada 2021 yang dapat dilihat pertumbuhan total merchant. Jumlah merchant QRIS DIY sebanyak 166.038 merchant saat ini, kemudian ditargetkan bisa bertambah dua kali lipat atau lebih, minimal 300.000 merchant pada 2021. Secara nasional tercatat 6 juta merchant QRIS sampai dengan akhir 2020, BI menargetkan akseptasi 12 juta merchant QRIS di seluruh Indonesia di tahun ini.

"Ini tantangan yang tidak gampang di tengah pandemi, seharusnya masyarakat sudah mulai pindah menggunakan QRIS karena sangat aman dan anti virus Korona. Untuk itu, kita masih harus meningkatkan sosialisasi penggunaan QRIS ini di DIY, baru kalangan milenial saja yang sudah banyak menggunakannya karena mempersyaratkan penggunaan QRIS melalui smartphone," imbuh Hilman. **(Ira)**

OJK dan IJK Salurkan Dana Kemanusiaan Rp 4,29 M

YOGYA (KR) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerjasama dengan Industri Jasa Keuangan (IJK) sejak awal 2021 kembali menggalang dana kemanusiaan dalam program 'OJK dan IJK Peduli Bencana' untuk membantu penanganan Covid-19 dan bencana alam yang terjadi di beberapa daerah. Dana yang berhasil terkumpul mencapai Rp 4,29 miliar yang dihimpun dari Anggota Dewan Komisioner OJK, 169 Industri Jasa Keuangan meliputi Perbankan, Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank atau IKNB serta asosiasi di sektor jasa keuangan serta bantuan dari Pegawai OJK hingga 1 Maret 2021 lalu.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dan Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X menyerahkan bantuan tersebut disaksikan oleh perwakilan industri jasa keuangan yang berada di DIY. Sementara untuk bantuan kepada korban gempa di Mamuju diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Barat Andi Ali Baal Masdar secara virtual.

KR-Istimewa

Wimboh Santoso didampingi Gubernur DIY Sultan HB X menyerahkan bantuan secara simbolis OJK dan IJK Peduli Bencana 2021.

"Dengan upaya ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana di berbagai daerah. Mudah-mudahan dengan sinergi ini bisa memperkuat upaya kita membangun negeri ini," kata Wimboh di Yogyakarta, Sabtu (6/3).

Wimboh menuturkan penyaluran bantuan tahap pertama yang diserahkan senilai Rp 2,175 miliar terdiri dari donasi bagi korban gempa di Mamuju Sulawesi Barat Rp 1,75 miliar, pembangunan shelter Covid-19 di Bantul DIY Rp 150 juta, bantuan banjir di Semarang Rp 100 juta, longsor di Sumedang Rp 100 juta dan perbaikan tanggul sungai Citarum Rp 75 juta. Penyerahan bantuan donasi untuk bencana Longsor di Sumedang dan tanggul Sungai Citarum akan dilaksanakan pada 13 Maret 2021 di Bandung bekerjasama dengan Jabar Bergerak.

"Program OJK dan IJK Peduli Bencana akan terus dibuka dan dikoordinir OJK untuk mengumpulkan donasi guna membantu penanganan dampak bencana alam serta penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Air," tegasnya. **(Ira)**

Indikator Ekonomi DIY
Kerjasama ISEI DIY, KR dan Bank BPD DIY

Ketimpangan Pengeluaran DIY

BADAN Pusat Statistik (BPS) dalam mengukur ketimpangan atau kesenjangan pengeluaran penduduk, menggunakan indikator Gini Ratio dan Distribusi pengeluaran menurut Bank Dunia (BPS DIY, 2021). Formula Gini Ratio adalah: Koefisien Gini yang didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi darinilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk (BPS, 2021). Nilai rasio gini berada pada rentang antara 0 sampai dengan 1. Nilai rasio gini yang semakin besar bahkan mendekati angka satu itu menunjukkan semakin tinggi tingkat ketimpangan penduduk di suatu wilayah.

Tabel berikut menyajikan perkembangan Rasio Gini DIY selama periode 2014-2020. Dalam periode tersebut, perkembangannya cenderung berfluktuasi baik untuk wilayah perdesaan dan perkotaan. Sejalan dengan kondisi tersebut maka Rasio Gini DIY (gabungan perdesaan dan perkotaan) juga cenderung fluktuatif. Tahun 2014-2016, Rasio Gini mengalami penurunan dari 0,435 pada tahun 2014 menjadi 0,425 pada tahun 2016.

Tabel Perkembangan Rasio Gini di DIY 2014-2020

Tahun*	Perdesaan	Perkotaan	DIY
2014	0,378	0,444	0,435
2015	0,332	0,443	0,433
2016	0,343	0,423	0,425
2017	0,317	0,447	0,440
2018	0,326	0,421	0,422
2019	0,326	0,430	0,428
2020	0,329	0,436	0,437

Sumber: BPS DIY (2021) Keterangan: * per September Grafis : Arko

Pada tahun 2017-2020, Rasio Gini mengalami kenaikan dan penurunan. Per September 2020, Rasio Gini sebesar 0,437 dan itu berarti mengalami peningkatan jika dibandingkan pada bulan yang sama tahun 2019.

Peningkatan Gini Rasio selama periode 2019 - 2020, dapat diduga terkait dengan dampak Pandemi Covid-19. Jika dibandingkan dengan provinsi lain, Gini Rasio DIY pada tahun 2020 yang sebesar 0,437 adalah tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data BPS DIY (2021), terdapat 7 provinsi (DIY, Gorontalo, DKI, Jawa Barat, Papua, Sultra, dan NTB) dengan Gini Ratio di atas Gini Ratio Indonesia yang sebesar 0,385.

Meningkatnya Gini Rasio di DIY dan tertinggi di Indonesia harus mendapat perhatian ekstra dari Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Berbagai kebijakan yang telah diterapkan untuk menekan ketimpangan selama ini harus dievaluasi. Berbagai alternatif kebijakan harus diperhitungkan dan dikaji secara cermat sehingga jika diterapkan akan lebih efektif dan berdaya guna. Selanjutnya dalam penerapan kebijakan selanjutnya diperlukan sinergi dengan pemangku kepentingan, yaitu dunia usaha, akademisi, BI, OJK, ISEI, perbankan, dan media massa.

(Dr. Y. Sri Susilo, SE, M.Si. Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika UAJY dan Sekretaris ISEI Cabang Yogyakarta)